

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, edisi kedua cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, M. Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan pertama (edisi revisi) Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Hendra, 2015, *Skenario Pemakzulan Presiden Jokowi*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Garner, Brian A, (editor), 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, Minnesota.
- Gaffar, Janedri M, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusional Press, Jakarta.
- Ghoffar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. revisi, cet. 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Reneksa Cipta, Jakarta.

- Mahfud MD, Moh, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukhlis dan Moh. Saleh, 2016, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, cet. 1, Setara Press, Malang.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum dan Peradilan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sapuan, 2010, *Impeachment Presiden*, Stain Purwokerto Press, Purwokerto.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soimin, 2009, *Impeachment: Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Strong, C.F, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, Nusa Media, Bandung.
- Sudding, Sarifuddin, 2014, *Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, cetakan pertama, Rangkang Education & Republik Institute, Yogyakarta.
- Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang.

- Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002)*, Buku Keempat, Jilid 1 (edisi revisi, cetakan kedua), Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Indhill Co., Jakarta.
- Wardani, Kunthi Dyah, 2007, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Yuda, Hanta, 2010, *Presidensial Setengah Hati*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yunas, Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.
- Zoelva, Hamdan, 2005, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Bambang Sutyoso, 2010, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*: Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Eko Noer Kristiyanto, 2013, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Rechts Vinding*: Volume 2 Nomor 3, Desember 2013, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI).

- Helmi, 2014, “Supermasi Hukum dalam Proses dan Mekanisme *Impeachment* menurut UUD Tahun 1945”, *Jurnal Inovatif*: Volume VII Nomor III, September 2014, (Fakultas Hukum Universitas Jambi).
- M. Ilham Hermawan dan Dian Purwaningrum, 2012, “Mekanisme Pemberhentian Presiden (*Impeachment*) dan Kritik Substansi Pengaturannya di Indonesia”, (*Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*: Volume 20 Nomor 2, Juni 2012, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin).
- M. Laica Marzuki, 2010, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*: Volume 7 Nomor 1, Februari 2010, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Misranto, 2014, “Mahkamah Konstitusi dalam Konstruksi Sistem Peradilan *Impeachment*”, *Jurnal Perspektif*: Volume XIX Nomor 3, September 2014, (Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan).
- Muhammad Bahrul Ulum, 2010, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)”, *Jurnal Konstitusi*: Volume 7 Nomor 4, Agustus 2010, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, (Fakultas Hukum Jember).
- Muhammad Fauzan, 2011, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses *Impeachment* Presiden menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*: Volume 11 Nomor 1 Januari 2011.
- Mulyanto, 2011, “Reformulasi Penguatan Majelis Permusyawaratan (MPR) dalam Proses *Impeachment* Presiden di Indonesia”, *Jurnal Yustisia* edisi 82 Januari-April 2011.
- Muni Datun Ni'mah, 2012, “Analisis Yuridis *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 8 Nomor 15, Februari 2012, (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya).
- Rusdianto S, 2010, “Proses *Impeachment* Presiden dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan dengan Mekanisme *Impeachment* di Amerika Serikat dan Korea Selatan)”, *Jurnal Hukum*: Volume XIX Nomor 19, Oktober 2010, (Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya).

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Harris Fadillah Wildan, 2010, Perbandingan Konstitusional Pengaturan *Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia

dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta).

Irawan Amin Nugroho, 2009, Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta).

Putu Eva Ditayani Antari, 2014, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis di Indonesia, (tesis), Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.

Risang Aji Pradana, 2016, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Implikasinya sebagai Suatu Alasan Pemberhentian Presiden, (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riyan Arinur Fitrah, Tjuk Wirawan, dan Gautama Budi Arundhati, 2013, “Perbandingan Yuridis Antara Republik Indonesia Dengan Amerika Serikat Tentang Proses Pemberhentian Presiden Atau Wakil Presiden Atas Perbuatan Tercela”, (artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa 2013 Universtas Jember).

Winarno Yudho, Andi M. Asrun, Mustafa Fakhri, Ahsin Tohari, Munafrizal Manan, Bisariyadi, Nanang Subekti, dan Silvia Andrianingsi, 2005, “Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” (*seri penelitian Mahkamah Konstitusi*), Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

D. Makalah/Pidato

Padmo Wahyono, 1998, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, makalah, September, (keterangan lebih lanjut tidak ditemukan).

E. Artikel Majalah atau Koran

M. Amien Rais, 1986, *Demokrasi dan Proses Politik* (pengantar), Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma, LP3ES, Jakarta.

Majalah Konstitusi, Edisi Januari 2010, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

F. Website dan Internet

Jimly Asshiddiqie, “Konsep Negara Hukum Indonesia” (pengantar), dapat diakses pada http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 16 September 2015.

Oxford Dictionaries, “democracy”, dapat diakses pada <http://oxforddictionaries.com/definition/english/democracy?q=democracy>, diakses 7 Desember 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “makzul”, dapat diakses pada <http://kbbi.web.id/makzul>, diakses 27 Desember 2015.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat 31 Januari 1950 Nr. 48 (c) Lembaran Negara 50-3) (du. 6 Februari 1950)

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. (UUDS 1950)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang kembali kepada UUD 1945. (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959), (Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959).

Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno.